



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2020



PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat :

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

4.4.2 Target Pencapaian SPM Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

Tabel 4.4.2.1 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Target SPM		
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2020	2019	2018
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	0.2233	0.2211	0.2178
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	2	Rasio Permukiman Layak Huni	96.82	96.79	96.76

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Realisasi untuk mencapai standar pelayanan minimal di dukung dengan program dan kegiatan serta Anggaran. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung target pencapaian SPM dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.4.3.1 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Realisasi SPM		
	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2020	2019	2018
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Rasio Rumah Layak Huni	0.2461	0.245	0.2292
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	2	Rasio Permukiman Layak Huni	96.8094	96.8085	96.79

4.4.4 Alokasi Anggaran :

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

**Tabel 4.4.4.1 Program dan Kegiatan pencapaian SPM Bidang perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedian
1	Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	1. Program Pengembangan Perumahan	1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2. Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR 3. Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun 4. Penunjang Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya 5. Penunjang DAK Perumahan 6. Pengendalian Bidang Perumahan 7. Perencanaan Bidang perumahan 8. DAK Perumahan	5.596.986.020
			2. Program Lingkungan Sehat Perumahan	1. Pengelolaan Air Limbah Setempat	3.147.623.790
	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni	1. Saluran Drainase dan Gorong	Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong Lingkungan	4.215.256.561
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	1.325.901.349

			3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4. Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	1. Pembangunan Jalan Minapolitan 1. Koordinasi Bidang Kawasan permukiman 2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman 3. Penunjang pemanfaatan dan pengendalian Kawasan Permukiman 4. Penyusunan DED Kawasan Permukiman	207.781.280
--	--	--	--	--	-------------

4.4.5 Dukungan Personil :

a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1. Aparatur Sipil Negara : 8 Orang-
2. Koordinator Fasilitator : 2 Orang
3. Tenaga Fasilitator Lapangan : 12 Orang

b. Penataan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha

1. Aparatur Sipil Negara : 7 Orang-

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.4.6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan.

2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.

Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.

3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.

4. Akibat adanya Pandemi *Corono Virus Disease 2019 (Covid 19)* terjadi Refocussing Anggaran sehingga Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan APBD Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan.

5. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM

Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD

dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

4.4.6.2 Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Tahun 2020 Pendataan untuk Rumah Tidak layak Huni sudah dilakukan dengan dana Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga sudah di dapat data jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan kondisi 31 Desember 2020 sebanyak 11.310 unit
2. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.

4. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001